

## Dinamika Sekuritisasi Isu Keamanan dalam Perkembangan Industri PSMC Afrika Selatan *vis-a-vis* Regulasi Pembatasan Pemerintah

Akhmad Hani Nadif<sup>1</sup> dan Probo Darono Yakti<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Universitas Airlangga

<sup>1</sup>ahaninadif1993@gmail.com

### Abstract

*This reaserach is about the 1998 RFMA Act and the establishment of a new PSMC company namely STTEPI in 2006. In 1989, South Africa experienced a period of emergency due to a major event that caused political instability in South Africa and its surroundings. The apartheid government carried out securitization to overcome these problems by establishing a security agency that took coercive actions on the security of the state and the ruling regime. After the process of transition of power, a new government was applied to the PSMC. On the other hand, in 2006 a new PSMC company was established. The research aims to answer the question how can the formation of bodies and restrictions that limit PSMC's movements, the PSMC industry continue to develop? In answering, concepts such as: (1) securitization are used to explain the emergence of the PSMC industry in South Africa; and (2) the concept of power; as well as (3) the national political image to describe the PSMC-government relationship which was analyzed using qualitative-descriptive methods from literature studies on primary sources from the government and secondary sources from scientific journal articles and news. It was found that in the application of regulations, the NCACC and PSIRA indicated that there were gaps in operating permits and having permits. There is interference from the PSMC in the government agency. This is compounded by the weaknesses of regulations which in their application are indicated to be poorly enforced. This study resulted in a conclusion that there was a complex relationship between industrial defense (PSMC) and the South African government due to major political changes and instability in regional political and security conditions that were used in omission actions in order to make losses and maximize opportunities for the country's economic interests*

**Keywords:** Power; National Political Image; PSMC; Security Agency

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kemunculan undang-undang RFMA 1998 dan pendirian PSMC STTEPI pada 2006. Afrika Selatan pada tahun 1989 menghadapi sitasi rentan akibat kerusuhan berskala besar yang menyebabkan kelabilan politik. Pemerintahan *apartheid* melakukan kebijakan sekuritisasi untuk merespons kondisi dengan membentuk agensi dalam bidang keamanan yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan diskresi atas kepentingan kestabilan negara. Setelah proses perpindahan otoritas, pemerintahan baru membatasi gerak-gerik PSMC. Di sisi lain, perusahaan PSMC baru berdiri pada tahun 2006. Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana industri PSMC tetap dapat berkembang meskipun telah terbentuk agensi yang mengatur pembatasan pergerakan PSMC? Untuk menjelaskan, konsep-konsep yang digunakan antara lain: (1) sekuritisasi dalam kelahiran PSMC Afrika Selatan; dan (2) konsep *power*; serta (3) *national political image* untuk mendeskripsikan relasi antara PSMC dengan pemerintah. Analisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dari

studi pustaka atas sumber primer dari pemerintahan dan sumber sekunder dari artikel-artikel jurnal ilmiah dan berita. Ditemukan fakta bahwa dalam penerapan regulasi, NCACC beserta dengan PSIRA terindikasi memiliki jalan keluar dalam mengoperasionalkan tugas dan wewenangnya. PSMC terlibat campur tangan dalam NCACC dan PSIRA, serta memiliki regulasi yang lemah dalam implementasi dan penegakan. Penelitian ini menghasilkan sebuah simpulan bahwa terjadi relasi kompleks antara industri pertahanan (PSMC) dengan pemerintahan Afrika Selatan akibat perubahan arah politik besar beserta ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan kawasan yang berujung pada tindakan pembiaran dalam rangka meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang bagi kepentingan ekonomi negara.

**Kata Kunci: Power; Citra Politik Nasional; PSMC: Lembaga Keamanan**

## **Pendahuluan**

Afrika Selatan merupakan negara dengan sejarah perpolitikan *apartheid* mulai dari tahun 1948 hingga 1994 yang penuh konflik. Sejak politik *apartheid* dan perang dingin usai, dukungan dan pengaruh Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS) menurun dengan signifikan yang berakibat pada ketidakstabilan politik-keamanan negara-negara Benua Afrika secara umum. Dengan kondisi sedemikian rupa, Afrika Selatan mendirikan sejumlah perusahaan *private security and military company* (PSMC) atau perusahaan penyedia jasa keamanan dan militer swasta (Senekal, 2012). Pendirian PSMC-PSMC dijalankan oleh pengusaha yang sebagian besar berasal dari barat dan pribumi Afrika Selatan. Di satu sisi memang pendirian PSMC memberikan rasa aman terhadap stabilitas politik di Afrika Selatan, namun di sisi lain pemerintah pretoria tidak memiliki pandangan yang sama terkait aktivitas industri di Afrika Selatan (Buzzsouthafrica, n.d).

*Executive outcomes* (EO) merupakan perusahaan PSMC yang didirikan mantan eks-perwira angkatan bersenjata afrika selatan (SADF) yang juga berstatus sebagai mantan anggota civil cooperation bureau (CCB), yakni Eeben Barlow. Inisiatif Barlow didukung oleh segenap jajaran mantan *elite* pasukan khusus Inggris sekaligus disokong oleh para pebisnis untuk mendirikan perusahaan konsorsium yang bergerak di sektor pertahanan-keamanan dan sumber daya mineral. Kepemilikan saham para direktur perusahaan terafiliasi membuat EO semakin bertumbuh-kembang menjadi PSMC besar di bawah naungan perusahaan induk *strategic resource corporation limited* (SRC). Operasional EO secara holistik dibiayai oleh konsorsium perusahaan SRC yang juga membawahi ibis air di Malta, Saracen di Uganda, dan 18 perusahaan lain yang bergerak di berbagai bidang. Dalam kapasitas maksimal, EO dapat merekrut 2.000 personil dengan kepemilikan alat-alat tempur seperti helikopter tempur Mil Mi-17 dan Mi-24, pesawat tempur Aero L-39 Albatros hingga pesawat carter seperti boeing 727 (Isenberg, 1997; Wrigley, 1999). Armada pesawat EO beroperasi di bandar udara internasional Johannesburg dan Malta yang dioperasikan oleh ibis air dan techline resource limited (Pech, n.d.).

Pada tahun 1993, CEO Heritage Oil & Gas Simon Mann dan CEO anak perusahaan Ranger Oil Tony Buckingham melakukan penyewaan jasa dari EO dalam rangka kembali menguasai alat-alat dari korporasi yang beralih ke tangan musuh. Pada saat itu Kota Soyo di Angola berhasil direbut oleh EO dari *União Nacional para a Independência Total de Angola* (UNITA) (Pelton, 2006; Campbell, 2002). Misi untuk menggagalkan sabotase dari UNITA dikenang sebagai operasi yang menjadi legasi EO sebagai PSMC prominen di Afrika. Kesuksesan EO diteruskan ketika pada tahun 1996, ketika pemerintahan Luanda menyewa jasa EO dalam rangka mengadakan pelatihan pada tentara Angola. Kendati telah berjalan dengan baik, tekanan politik PBB dan AS yang cukup kuat membuat Angola memutuskan kontrak secara sepihak dengan EO (UNGA, 1997).

Pada saat yang bersamaan, pada dekade 1990an kondisi politik-keamanan di Afrika secara umum mengalami kelabilan. Perang sipil pecah di Kongo pada tahun 1996-1997, ketika diserbu oleh koalisi negara-negara Afrika yang terdiri atas Angola, Eritrea, Rwanda, Tanzania, Uganda, dan Zimbabwe. Koalisi negara-negara Afrika tersebut menunjuk Joseph Kabila Kabange dalam rangka melengserkan presiden petahana Kongo Mobutu Sese-Seko. Era kepemimpinan presiden Mobutu Sese-Seko membuat destabilisasi dalam berbagai sektor pemerintahan Kongo akibat kasus korupsi terstruktur, sistematis, dan masif harus berakhir pada Mei 1997 (ReliefWeb, 1999). Kondisi Kongo pasca perang berpotensi untuk menciptakan eskalasi konflik yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat (Wrigley, 1999).

Eeben Barlow di tahun 1998 melakukan inisiatif pada proses negosiasi dengan pemerintah Afrika Selatan terkait regulasi aktivitas perusahaan PSMC. Regulasi meliputi Undang-Undang (UU) No. 15 tahun 1998 tentang bantuan militer asing atau *regulation of foreign military assistance* (RFMA). Sebagai imbas dari penetapan UU 15/1998, PSMC sekaligus EO terpaksa bubar karena tidak memenuhi persyaratan izin yang telah diimplementasikan dalam peraturan tersebut. Selain itu, Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki beserta jajaran memberikan tindak lanjut atas peninjauan ulang UU 15/1998, dengan membuat aturan-aturan lain yang bersifat mengkhususkan atau mendetailkan seperti UU No. 56 Tahun 2001 tentang industri keamanan swasta dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang retribusi industri keamanan swasta (Government of South Africa, 2001; 2002). Keberadaan UU 56/2001 dan UU 23/2002 memberikan angin segar terhadap kontrol pada kegiatan-kegiatan PSMC. Setelah diberlakukan aturan PSMC tidak dapat sembarangan beroperasi apabila tidak dapat menyetorkan retribusi pada pemerintahan Afrika Selatan. Peninjauan ulang atau *judicial review* oleh berbagai pihak termasuk khalayak Afrika Selatan terhadap UU 15/1998 terus bergulir sampai pada upaya untuk mencegah pihak-pihak tertentu agar tidak mengambil keuntungan dari perang Irak sepanjang 2003 sampai dengan 2011. Efek jera dapat dirasakan dengan penerbitan UU No. 27 Tahun 2006 tentang larangan kegiatan tentara bayaran dan pengaturan kegiatan tertentu di negara konflik bersenjata (Isenberg, 1997; Government of South Africa, 2006). Aturan yang disebut belakangan memberikan restriksi yang cukup signifikan pada kegiatan-kegiatan PSMC yang cukup padat pada berbagai tempat di Afrika. Pasca pemberlakuan aturan-aturan tersebut mendorong EO bubar pada tahun 2006.

Pada tahun 2006, dua orang veteran SADF bernama Lourens Horn dan Harry Carlse bersama dengan Eeben Barlow mendirikan sebuah PSMC baru yang dinamakan *specialised tasks, training, equipment, and protection international* (STTEPI). STTEPI secara langsung aktif melakukan operasi di Afrika, Amerika Selatan, serta kawasan barat dan timur Asia. STTEPI muncul pertama kali dalam media pada tahun 2015, ketika menunjukkan sepak terjang dalam pelaksanaan operasi militer melawan kelompok pemberontak Boko Haram di Nigeria. CEO STTEPI Eeben Barlow menyatakan bahwa perusahaan mengirimkan berbagai macam asistensi seperti rancangan strategi, kecukupan logistik, dan rangkaian taktik hingga mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kekuatan angkatan bersenjata Nigeria (Freeman, 2015; Murphy, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara industri PSMC dapat berkembang di Afrika Selatan kendati mengalami sejumlah limitasi akibat peraturan-peraturan seperti UU 15/1998, UU 56/2001, UU 23/2002, dan UU 27/2006 yang diberlakukan pemerintah Pretoria melalui *national conventional arms committee* (NCACC) dan *private security regulatory authority* (PSIRA). Secara garis besar terdapat tiga pendekatan yang dapat menjawab jeda pemahaman di atas, antara lain: sekuritisasi, *power* dan *political national image*. Tiga pendekatan ini kental akan corak bidang politik dan keamanan di dalam lingkup hubungan internasional yang lebih luas.

Pertama, konsep sekuritisasi yang terdiri atas tiga tolok ukur, antara lain: (1) *speech act*; (2) pendekatan politik-keamanan *Schmittian*; dan (3) pendekatan-pendekatan tradisional tentang keamanan (van Munster, 2005; Wæver, 2011; Williams, 2003). Lebih lanjut, keamanan internasional adalah pengembangan konsep keamanan secara nasional yang menekankan di golongan dengan otoritas yang membangun gelombang permusuhan bersifat mengancam. Ekspektasi besar pada negara terdapat urgensi dalam kepemilikan kapabilitas pembuatan keputusan dan mengeksekusi tindakan-tindakan darurat yang diperlukan. Pada tahun 1989, Pemerintah Afrika Selatan di Pretoria mengeksekusi kebijakan sekuritisasi dalam rangka membendung kekuatan oposisi yang mulai bergerilya menggulingkan pemerintahan *apartheid*. Selain itu, kebijakan sekuritisasi juga mencoba memberikan perlindungan pada kedaulatan pemerintah Afrika Selatan. Dalam menjalankan kebijakan sekuritisasi, sejumlah kelompok bersenjata dibentuk dengan asistensi dari jasa EO yang disewa pemerintah untuk memberikan pelatihan khusus terhadap pasukan intelijen (Pech, n.d).

Konsep kedua, *power*, lebih menjelaskan kegiatan-kegiatan transaksional militer yang secara langsung banyak dipengaruhi aspek politik. Transaksi militer menukar *power* antar pihak, membuat keterbatasan data yang kapabel untuk diakses publik. Sebagian besar sumber informasi terkait urusan-urusan keamanan justru dirahasiakan. Sebagai konsekuensi dari kerahasiaan data, transaksi militer tidak dapat dikatakan mutlak *valid*. Terdapat keterbatasan peneliti terkait dengan kealpaan konsep relevan pada sektor transaksi alat utama sistem pertahanan (alutsista) atau jasa penyedia keamanan dan tentara (Anderton, 1995; Lieshout & Beeres, 2022). Pendekatan teori-teori ekonomi dan perdagangan klasik maupun konvensional yang ada tidak dapat digunakan mengingat sifat dari transaksi perdagangan senjata dalam konteks keamanan yang kurang selaras (Peoples & Williams, 2021).

Konsep terakhir yakni *political national image* berguna dalam mengamati perubahan aturan yang diimplementasikan Pretoria pada PSMC yang beroperasi di Afrika Selatan. Pemerintahan Afrika Selatan melalui seperangkat aturan yang ada masih memperhitungkan integritas dan kaitan dengan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri dalam rangka menampakkan citra politik Afrika Selatan. Pada organisasi politik, kewenangan adalah aspek yang vital terutama apabila dikaitkan dengan konsep *power* pada pengambilan keputusan-keputusan penting dalam negara. Dahl (1996) dalam *a preface to democratic theory*, menyebutkan bahwa *power* menghubungkan kapabilitas dengan kontrol. Ketika terjadi konflik antar kepentingan di dalam masyarakat, kepentingan yang dianggap unggul secara pengaruh dan *power* akan mendominasi kepentingan yang lain kendati di dalam tulisan lain argumen mengenai *power* (Dahl, 1957; Jha, 1977) dibantah dengan artikel Baldwin (1979) yang kerap disalahartikan oleh akademisi-akademisi hubungan internasional.

Sebagai aktor penentu *power* baik secara ekonomi, militer, politik dalam dan luar negeri, individu maupun negara tergolong fokus citra nasional. Zamyatin (1998) menjelaskan bahwa citra politik merupakan penekanan pada cara memimpin, simbol, dan atribut lain dari negara, wilayah, serta aliansi militer. Atribut-atribut yang telah disebutkan melekat pada pemimpin negara dan/atau kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berada di bawah pemimpin negara dalam membangun dan memersepsikan citra negara, yang secara eksternal juga terpengaruh oleh opini dari investor asing dan publik dari negara-negara lain (Cohen, 2000; Ingenhoff & Klein, 2018; White, 2012; Li & Chitty, 2009).

## Metode

Penulis menggunakan cara kualitatif-deskriptif untuk memberikan penggambaran secara spesifik dan mendetail terhadap permasalahan yang tersedia. Cara yang dimaksud sebagai kualitatif-deskriptif melakukan penelaahan terhadap fenomena menggunakan pendekatan-pendekatan konsep atau teori yang telah ada dan menghasilkan kesimpulan berupa sebuah gambaran atau deskripsi mengenai keadaan riil yang terjadi dalam konteks di lapangan. Data-data primer terdiri atas dokumen-dokumen berasal dari pemerintahan berupa aturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder berupa artikel jurnal, buku, bab buku, dan juga artikel yang tersedia secara daring di internet. Artikel yang dikumpulkan berkisar antara 1990an ketika PSMC bermunculan di Afrika sampai dengan 2000an, dapat berupa artikel ilmiah yang ditulis para ahli maupun artikel berita dari media-media yang terpercaya dan berintegritas. Dalam membandingkan fenomena yang terjadi dengan teori atau konsep, penulis menggunakan pendekatan studi pustaka yang menganalisis secara holistik dari pustaka-pustaka terdahulu. Penelitian berjenis studi pustaka tidak menggunakan satu pun instrumen atau alat bantu dalam mencari sumber informasi atau data yang ada. Analisis data berfokus pada analisis konten yang tersedia pada sumber yang ditelaah melalui pendekatan politik-keamanan dalam hubungan internasional.

## Hasil dan Pembahasan

Celah penelitian dalam aturan restriksi yang diterapkan oleh pemerintahan Afrikas Selatan terhadap PSMC. Jeda pemahaman meliputi kealpaan aturan penjualan bantuan keamanan dan tentara yang diatur dalam UU 15/1998 serta UU 56/2001 (Government of South Africa, 1998; 2001). Terdapat pola-pola yang mengindikasikan relasi antar aktor yang diartikan sebagai petugas keamanan menurut UU 56/2001. Pertama, interpretasi petugas keamanan sebagai pihak yang didelegasikan oleh aktor atau agensi perorangan atau negara mendapat ongkos jasa yang dalam batasan tertentu juga menghasilkan pundi-pundi laba personal untuk menjalankan wewenang. Diferensiasi undang-undang dasar dan pasal lain terdapat celah-celah terlihat dari operasi Irak pada tahun 2003 dan 2009 yang dilakukan Erinys International di Irak. Erinys International telah tertangkap media-media global dalam kasus penembakan warga sipil pada operasi Irak (Business & Human Rights Resource Centre, 2009).

NCACC sebagai badan pemerintahan Afrika Selatan yang mengatur mengenai kegiatan industri PSMC berisikan lima orang anggota berasal dari pemerintah, dan uniknya anggota dewan penasihat yang terdiri atas beberapa CEO PSMC (Government of South Africa, 2009). Keterlibatan lebih lanjut pada NCACC walau bersifat menyesuaikan situasi dan kondisi dapat membuat sebuah asumsi relaso berdasar *power* pemerintah-swasta. Anomali yang diperlihatkan dengan kedekatan antara swasta dengan pemerintah Afrika Selatan membuat sikap independen dan kredibilitas negara dalam batasan tertentu menjadi pertarungan yang cukup serius.

Kedua, terdapat fakta dalam dinamika PSMC. Sebagai contoh, kasus EO, Erinys Internasional, dan STTEPI yang dimiliki oleh satu konsorsium perusahaan yang sama bernama SRC bermarkas di Inggris. Posisi signifikan Barlow dalam PSMC SRC sebagai salah satu pemimpin penting di EO dan pendiri STTEPI menorehkan hasil yang signifikan pada saat EO menjadi perusahaan PSMC terbesar di dunia pada dekade 1990an. Pada waktu itu, EO beroperasi di Sierra Leone yang mana pada saat bersamaan mendapatkan konsesi tambang berlian sekaligus. EO tidak bertahan lama setelah parlemen Afrika Selatan memberlakukan UU 15/1998, yang berimbas pada tidak dipenuhi dan pelanggaran syarat-syarat yang ditentukan. Pemerintah Afrika Selatan memutuskan EO bersalah dengan delik aduan melakukan aktivitas ilegal selama masa

beroperasi di Sierra Leone. Kedua tindakan ini kemudian menyebabkan pembubaran EO pada tahun 1998 (Government of South Africa, 1998; Harding, 1997; Howe, 1998; Maciag, 2019).

Pada tahun 2003, PSMC asal Afrika Selatan Erinyes International beroperasi di wilayah Irak yang merupakan wilayah konflik. Irak menjadi lahan pertarungan geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar seperti AS dan Rusia yang saling tarik-menarik mendapat dukungan dari dunia internasional apakah untuk menginvasi atau mendukung pemerintahan Saddam Husein. Pada saat itu, UU 15/1998 dan UU 56/2001 aktif diberlakukan (Tromp, 2004; National Assembly, 2004; Juma & Tsabora, 2014. Senekal, 2012). Dua UU tersebut mengatur pembentukan dan kewenangan PSIRA, meskipun dapat dikatakan tidak dibekali oleh landasan fundamental UU yang cukup kuat dalam rangka pembentukan dan pemberian wewenang dan tugas pokok yang jelas terutama sekali untuk PSMC (Government of South Africa, 1998; 2001).

Ketiga, perusahaan STTEPI berdiri pada tahun yang sama dengan pemberlakuan UU 27/2006 yang menyebabkan syarat-syarat baku atas operasi jasa keamanan dan militer swasta (Government of South Africa, 2006). Kebijakan berdasarkan peraturan perundangan yang ada menjadi fokus daripada mencermati pasal per pasal yang terkandung di dalam UU yang ada. Personil STTEPI direkrut dari mantan-mantan petugas keamanan yang juga warga negara Afrika Selatan di era *apartheid*. Meski di poin yang telah lebih dahulu disebutkan bahwa STTEPI tak lolos ketentuan dan syarat minimal sesuai UU, pada tahun 2015 STTEPI tetap dapat melakukan operasi militer saat pecah peristiwa Boko Haram di Nigeria (McCain, 2017; Tayo, 2021). Dalam pasal keputusan tentu berada di antara pihak-pihak yang berwenang seperti PSIRA, NCACC, dan Kementerian Pertahanan Afrika Selatan. Terdapat eskalasi dinamika *power* sedang terjadi, jika diamati melalui pasal-pasal yang melimpahkan wewenang diskresi pada lembaga pemerintahan dengan keterlibatan PSMC di dalam urusan internal negara.

Menangkap peluang dengan tren keberadaan industri PSMC yang cukup besar, pemerintahan Afrika Selatan di Pretoria menerapkan kebijakan dalam rangka menegakkan hukum domestik maupun internasional pada industri PSMC. Penerapan kebijakan dilakukan dalam rangka menunjukkan citra politik nasional Afrika Selatan. Di dalam pembentukan citra diri nasional, pemerintah Afrika Selatan menerapkan metode *top-down* dengan memfokuskan diri pada visi pengembangan industri PSMC agar dapat tetap sejalan sebagai salah satu penyokong utama dalam ekonomi negara. Perkembangan industri PSMC sekaligus penerapan regulasi badan pemerintahan di Afrika Selatan tidak mudah mengingat terjadi dinamika sekuritisasi yang volatil pada akhir 1980 dan terus berkesinambungan sampai pada penggunaan *power* dalam relasi antara pihak swasta-pemerintah (Axelrod & Dubowe, 2014).

## 1. Ambiguitas Definisi PSMC

Meski telah beberapa dekade berkiprah di medan peperangan dalam dunia internasional, secara riil definisi terkait PSMC masih belum tercapai konsensus sampai pada level dukungan logistik dan teknis. Klasifikasi yang melekat pada perusahaan salah satunya berdasarkan definisi *geneva centre for democratic control of armed forces* (DCAF), bahwa PSMC bersifat ofensif sedangkan PSC, tanpa aspek militer, bersifat jauh lebih bertahan. Langkah dalam mengklasifikasikan berlanjut dengan term lain seperti *tip of the spear* yang mengobservasi dalam sudut pandang lebih dekat terkait operasi PSMC dengan medan tempur garis depan dengan menyediakan jasa senjata sekaligus personil. Pada akhirnya, perspektif-perspektif di atas mengacu pada deskripsi singkat ketimbang menjadi definisi yang bersifat baku (Senekal, 2012). Dengan demikian penggunaan istilah PSMC dirujuk penulis sebab belum tercipta konsensus terkait definisi secara harfiah maupun kebahasaan.

Melalui observasi dengan metode operasional, perusahaan PSMC menjadi semacam wadah dalam rangka merekrut individu-individu yang dianggap memiliki kapabilitas tempur tertentu. Berlaku pada rekrutan dari sumber mantan angkatan bersenjata dari suatu negara maupun kelompok-kelompok milisi yang dikaryakan dalam medan perang tertentu sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh klien. Kegiatan PSMC seringkali memiliki satu anak perusahaan *off-shore* dalam konteks penjagaan terhadap aset-aset yang dimiliki jika terjadi pelanggaran regulasi. Perusahaan PSMC juga memiliki mobilitas tinggi untuk berpindah-pindah secara nomaden dari satu negara ke negara lain untuk secara proaktif dapat membentuk suatu jaringan perusahaan induk dan anak perusahaan. Secara peran, PSMC digolongkan dalam tiga jenis: 1) defensif atau fungsi keamanan; 2) logistik; dan 3) *tip of the spear* atau ujung tombak, yang disebut pula sebagai *combat support* (Senekal, 2012).

## 2. Dinamika Perusahaan PSMC dan Kondisi Keamanan Domestik di Afrika Selatan

Usai dimobilisasi yang bermula pada sekitar tahun 1990an, terdapat 3.500 orang yang tergabung dalam resimen pasukan khusus dan intelijen mulai melihat peluang dalam melakukan usaha pada bidang-bidang yang bersentuhan dengan isu keamanan baik di lingkup negara maupun kawasan (Mursitama & Setyawan, 2012). Terdapat sebuah fakta di lapangan bahwa kemampuan yang telah didapatkan dari militer, kapabel untuk diperjualbelikan sebagai jasa. PSMC di Afrika Selatan diisi para eks-tentara dari kesatuan-kesatuan *elite* yang dimiliki oleh angkatan bersenjata. Antara lain kesatuan kontra-pemberontak dalam kepolisian Afrika Barat Daya (SWAPOL/Koevoet) yang berada di bawah koordinasi SADF pada operasi di bagian utara Namibia, pejabat dan detektif dalam kepolisian Afrika Selatan, Brigade Parasut 44, CCB, Directorate of Covert Collection (DCC), dan resimen pasukan intai khusus batalion 325 (Wren, 1989). Sebagai contoh PSMC EO, yang berdiri tahun 1989 oleh mantan anggota CCB Letkol SADF Eben Barlow (Pech, n.d). Selain Barlow, EO juga dimanajemen oleh gabungan eks-pasukan khusus Inggris dan sejumlah pengusaha yang menjabat sebagai direktur dan pemilik saham di beberapa perusahaan terafiliasi. Pada tahun 1994 sampai dengan 1997 terjadi perkembangan pesat dalam perusahaan EO terutama mencetak torehan-torehan jasa dalam peperangan di Afrika. Gayung bersambut pada tahun 1996, ketika pemerintah Angola secara resmi menggunakan jasa EO dalam rangka melatih angkatan bersenjata Angola. Kendati di separuh perjalanan kontrak, terjadi pemutusan kontrak sepihak dari pemerintah Angola yang disebabkan oleh intervensi politik dari AS dan PBB namun operasi pelatihan ini dapat dikatakan menjadi satu bentuk kesuksesan EO dalam mengambil alih konstruksi militer sebuah negara (Pech, n.d; Senekal, 2012; Barlow, 2007). Pada tahun 1995, perusahaan EO terus menunjukkan kiprah dengan memukul mundur posisi pasukan pemberontak berpengalaman sebelas tahun yakni Revolutionary United Front, hingga 126km ke dalam hutan di Sierra Leone.

Pada tahun 1998, Barlow yang pada saat itu menjabat CEO EO bernegosiasi dengan pemerintah Afrika Selatan untuk secara bersama merumuskan regulasi kegiatan PSMC. Setelah itu lahir UU 15/1998 berbunyi: tidak ada orang di republik atau di tempat lain merekrut, menggunakan atau melatih orang untuk atau membiayai atau terlibat dalam aktivitas tentara bayaran. Kendati di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 terdapat ayat yang berisikan syarat perizinan mengenai kegiatan PSMC yang tentatif menyesuaikan keadaan sehingga terkesan terlalu fleksibel (Government of South Africa, 1998). Pemerintah Afrika Selatan secara resmi membubarkan EO pada tahun 1998 mengingat perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan izin yang telah ditetapkan sesuai UU 15/1998 (Anon, n.d). Tiga tahun berselang, barulah kemudian diimplementasikan aturan-aturan lain lebih lanjut seperti di antara lain UU 56/2001 dan 23/2002

yang makin memperkuat kontrol pemerintah atas PSMC-PSMC yang berdiri dan beraktivitas di Afrika Selatan (Government of South Africa, 2001; 2002).

Pada saat invasi AS ke Irak pada 2003-2004, PSMC Erinys International disewa oleh badan transisi pemerintahan Irak yakni *coalition provision authority* (CPA) untuk melatih 6.500 personil milisi. Milisi-milisi ditugaskan dalam rangka menjaga 140 ladang minyak, 7000km pipa minyak, pembangkit listrik, kilang minyak, dan suplai air yang ada di negara Irak. Nilai kontrak Erinys International sebesar US\$39,5 juta dengan rencana-rencana program kerja sebagai berikut: 1) menjadi pionir pembangunan infrastruktur keamanan pada tempat-tempat yang ditugaskan serta memberikan kontrol secara gradual pada angkatan bersenjata Irak dalam rentang waktu dua tahun; 2) membentuk pasukan-pasukan yang terlatih dalam rangka menjaga situs strategis dilengkapi infrastruktur keamanan yang memadai. Dua poin tersebut bertentangan dengan penegasan UU 15/1998 yang melarang perekrutan *mercenary* atau tentara bayaran baik dari internal maupun eksternal Afrika Selatan (Government of South Africa, 1998; Isenberg, 2004).

Pemerintah Afrika Selatan kemudian pada tahun 2006 merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan baru yang memberikan larangan keras pelbagai aktivitas PSMC dengan UU 27/2006. Pada alinea kedua UU 27/2006 terdapat pernyataan yang berbunyi kurang lebih sebagai berikut: pelarangan terhadap segala macam bentuk kegiatan maupun asistensi terkait kegiatan militer, terdiri atas kegiatan-kegiatan: 1) konsultasi dan pelatihan; 2) penyediaan bantuan personil, finansial, logistik, intelijen, dan operasi; 3) rekrutmen personil; 4) penyedia jasa medis dan paramedis; dan 5) penyediaan peralatan (Government of South Africa, 2006).

Alinea ketiga menjelaskan secara lebih terperinci daftar-daftar kegiatan terlarang PSMC, sedangkan alinea ketujuh menjelaskan syarat-syarat perizinan PSMC diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan dalam lingkup negara Afrika Selatan. Aturan perundangan yang dibuat pemerintah Afrika Selatan memberikan restriksi secara gamblang terkait aktivitas-aktivitas baik perusahaan yang tergolong sebagai swasta militer maupun perseorangan dengan memberikan sebuah afirmasi dalam bentuk persyaratan-persyaratan tambahan. Syarat tambahan tersebut berupa perizinan terkait kegiatan militer yang tidak bersumber dari pemerintah dalam situasi maupun kondisi tertentu (Gordon, 2005). Dalam batasan tertentu pendirian STTEPI pada tahun 2006 pasca EO bubar dapat menciptakan ruang dan suasana baru dalam geliat industri PSMC. Misalkan ditunjukkan STTEPI dengan keberhasilan operasi militer pertama menumpas kelompok pemberontak Nigeria Boko Haram di tahun 2015 (Murphy, 2015). STTEPI mengadakan pelatihan pada personil-personil angkatan bersenjata Nigeria dalam rangka melakukan operasi pembebasan siswa sekolah yang lebih dahulu disandera pemberontak Boko Haram di wilayah Chibok, Nigeria. STTEPI membentuk sejumlah satuan-satuan ofensif serta menyediakan berbagai solusi dukungan tempur seperti elemen dukungan strategis, taktis, dukungan material mata-mata melalui udara, dan interaksi aktif selama menjalankan misi (Murphy, 2015).

Direktur Eksekutif STTEPI Eeben Barlow menjelaskan gelaran operasi militer bertujuan mengampanyekan strategi taktik logistik sampai kepada pelatihan sekaligus dukungan terhadap angkatan bersenjata Nigeria (Senekal, 2012). Berbekal sejumlah individu berkemampuan khusus dan memiliki pengalaman di sektor keamanan, STTEPI menawarkan berbagai solusi pertahanan dalam bentuk jasa untuk melatih intelijen, angkatan bersenjata, dan badan penegak hukum. Selain upaya-upaya yang telah disebutkan, STTEPI menawarkan jasa konsultasi keamanan profesional terhadap pemerintah, tentara penjaga perdamaian PBB, dan NGO sekaligus bantuan pemeliharaan, peralatan, dan evaluasi dari pemerintah serta pergerakan PSMC pada kawasan-kawasan yang rentan. Di samping itu, STTEPI apabila mendesak dan diperlukan dapat mengerahkan personil secara mendadak (STTEPI, n.d.).



Konstelasi yang terjadi pada keamanan domestik Afrika Selatan dipenuhi dengan berbagai macam jenis kriminalitas yang berasal dari masyarakat sendiri mulai yang bersifat sporadis hingga terorganisasi, ancaman-ancaman dalam berbagai aspek di Afrika Selatan apabila dibiarkan begitu saja dengan mengandalkan kekuatan secara konstan dapat mengancam kestabilan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Rasa yang kurang aman secara simultan dapat timbul akibat peningkatan kasus kriminalitas sehingga bermunculan sikap proliferasi senjata sekaligus kenaikan angka kekerasan. Menurut *government communication and information system* (GCIS, 2015), sebuah badan pemerintahan Afrika Selatan, di dalam skala yang cukup besar angka kejahatan mengalami penurunan signifikan namun tidak disertai tingkat kriminalitas yang stabil menunjukkan sebuah tren yang apabila dipersentasekan cukup tinggi. Misalkan perampokan dan penyanderaan yang meningkat 70%. Titik kulminasi kasus kriminal di antara 2004 hingga 2005 yang membuat gejolak dilema keamanan yang bertentangan dengan visi pemerintah Afrika Selatan untuk menurunkan tingkat kriminalitas. Afrika Selatan dengan terpaksa menggunakan jasa PSMC sebagai respons atas kealpaan penjaga keamanan yang minim dalam menghadapi fenomena kriminalitas. Kebutuhan mendesak Afrika Selatan untuk merekrut PSMC yang secara simultan menyebabkan terjadi proliferasi dalam industri keamanan swasta di Afrika Selatan (Taljaard, 2008).

### **3. Analisis Kebijakan Regulasi Afrika Selatan Terhadap PSMC**

Pemerintah Afrika Selatan pada tahun 2006 menerapkan UU 27/2006 yang memperkuat instrumen regulasi kegiatan perusahaan PSMC. Dalam UU 27/2006, PSMC diberikan keleluasaan dengan bersyarat lisensi operasi sesuai dengan rezim lisensi ekspor pada aturan lain sebagaimana UU 15/1998. PSMC lebih lanjut harus melakukan pendaftaran kepada pihak PSIRA di bawah UU 56/2001 (Bosch, 2011; Government of South Africa, 1998; 2001; 2006). Penulis mendapatkan kendala dalam mencari detail teknis tentang PSMC mengingat sifat perusahaan PSMC yang kurang transparan dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan data pada publik.

Dalam rangka mendapatkan izin legal dalam beroperasi, PSMC menjalani serangkaian proses *screening* dalam rangka mencocokkan *code of conduct* yang sudah diterapkan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan berdasarkan UU 56/2001. UU 56/2001 yang kemudian memberikan landasan PSIRA untuk mewajibkan pihak peminta izin agar dapat menyerahkan sertifikat *clearance* apabila seseorang merupakan eks-anggota angkatan bersenjata, polisi, atau mata-mata dari Afrika Selatan atau negara-negara yang lain (Kruck, 2014; Government of South Africa, 2001). Dalam memberikan aturan ketat pada PSMC, pemerintah Afrika Selatan menggunakan distingsi strategi mendekati pihak lain apabila dikaitkan AS. AS adalah pengguna jasa PSMC yang lebih lanjut memproduksi pasukan-pasukan *proxy*. Di sisi yang berseberangan, pemerintahan Afrika Selatan melihat persoalan tentang PSMC perlu untuk diselesaikan secara serius agar tidak mengganggu relasi dan politik internasional Afrika Selatan yang mengedepankan hak asasi manusia serta tunduk pada norma-norma dalam hukum internasional (Taljaard, 2008).

Dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat indikasi-indikasi celah untuk tetap beroperasi dan mengembangkan usaha yang telah diatur dalam UU 15/1998 tentang batasan legal operasional PSMC beroperasi di wilayah Afrika Selatan sebagaimana tercantum dalam pasal 198 (b) konstitusi Afrika Selatan yang berbunyi: tekad untuk hidup dalam damai dan harmoni menghalangi warga negara Afrika Selatan untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata, secara nasional atau internasional, kecuali sebagaimana diatur dalam Konstitusi atau undang-undang nasional. (Gumedze, 2008).

Sebagai konsekuensi atas aturan yang diberlakukan, PSMC tetap proaktif meskipun dibatasi secara ketat oleh pemerintah Afrika Selatan dengan beberapa catatan. Catatan pertama

merujuk pada undang-undang yang berlaku di Afrika Selatan dengan mengizinkan operasi militer dan layanan keamanan swasta baik dipersenjatai maupun tidak. Catatan kedua, PSMC mendapatkan penawaran baik di sektor domestik maupun mancanegara asal dapat melengkapi diri dengan komponen jasa konsultasi risiko (*risk consultancy*) dalam usaha yang dirintis. Dalam skenario terpisah, sektor swasta akan memberikan daya dukung dalam rangka penanganan situasi penyanderaan dan penebusan. Selain itu PSMC diwajibkan memberi layanan pelatihan kepada angkatan bersenjata dan warga sipil di daerah yang tergolong berpotensi rawan terjadi konflik bersenjata.

Kedua sifat layanan yang diberikan akan menyesuaikan dengan kriteria dari pelanggan PSMC. PSMC dapat mengambil peran baik sebagai kekuatan kepolisian (*policing*) maupun militer. Dalam peran sebagai kekuatan kepolisian, kontrak PSMC disodorkan oleh sektor-sektor seperti organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pemerintahan (Abrahamsen & Williams, 2011). Peran kepolisian PSMC secara umum menyangkut pada sektor domestik seperti pengendali huru-hara dalam demonstrasi, distribusi logistik, hingga manajemen lembaga permasyarakatan. Tugas-tugas kemiliteran PSMC antara lain *outsourcing* tentara seperti lokakarya, pemeliharaan alutsista, serta bantuan baik teknis maupun nonteknis kemiliteran lain untuk pemerintah (Abrahamsen & Williams, 2011).

Industri pertahanan berkembang menjadi industri yang memiliki dampak strategis bagi masa depan pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan. Terdapat urgensi dalam mendirikan sejumlah badan pemerintahan dan menegakkan regulasi untuk mengawasi kegiatan-kegiatan industri pertahanan sekaligus menunjang kebijakan strategis dalam bidang yang sama. Oleh karena itu, dibentuk badan-badan yang berfungsi sebagai regulator kegiatan PSMC di Afrika Selatan seperti PSIRA dan NCACC yang diatur dalam UU 15/1998, 56/2001, dan 27/2006. Lebih spesifik pada UU 56/2021 yang memberikan kewenangan PSIRA dalam rangka menjalankan tugas (Daniel *et al.*, 2004). Dalam jangka waktu delapan tahun, Afrika Selatan memiliki landasan hukum yang kuat untuk meregulasi kiprah PSMC.

Berbeda dengan PSIRA, NCACC adalah perwujudan UU No. 41 Tahun 2002 tentang kontrol senjata konvensional nasional (UU NCAC) dan konstitusi Afrika Selatan (Government of South Africa 2002; 2009). Dengan amanat dari kedua aturan tersebut, pemerintah Afrika Selatan berkomitmen dalam menaati hukum internasional dengan pengawasan lebih ketat lagi aktivitas perdagangan senjata yang juga dilakukan oleh PSMC. UU 41/2002 memberikan landasan fundamental pada tupoksi NCACC sekaligus menegaskan kembali arahan dari pemerintahan Afrika Selatan untuk mengupayakan perdagangan senjata yang lebih teratur dan terlembaga (Government of South Africa, 2009).

UU 15/1998 diundangkan secara resmi september 1998, dan membuat Afrika Selatan masuk daftar kelompok negara yang mengedepankan persoalan penting regulasi kegiatan PSMC. Dunia internasional menetapkan Afrika Selatan sebagai percontohan dalam mengatur kegiatan-kegiatan PSMC (Government of South Africa, 1998; 2009). Erinys Internasional yang beroperasi di Irak dan melibatkan pekerja dari unsur warga negara Afrika Selatan secara langsung melanggar UU 15/1998. NCACC menyatakan bahwa Irak tergolong dalam wilayah konflik, dengan demikian dapat meningkatkan urgensi implementasi dari UU 15/1998. Menanggapi kasus yang terjadi di Irak, pemerintahan Afrika Selatan mengeluarkan RUU pelarangan aktivitas tentara bayaran atau *mercenary* dan PSMC di wilayah konflik. Permintaan pemerintahan Pretoria direspons oleh parlemen Afrika Selatan dengan pengabulan UU 27/2006. Dinamika ini yang kemudian memberikan perubahan sikap dan kondisi lanskap regulasi di Afrika Selatan terhadap PSMC (Boemcken, 2013).

UU 56/2001 termasuk kategori perundangan baru yang meregulasi status identifikasi personil keamanan, perusahaan kontraktor, dan manajer sebagai penyedia jasa keamanan. Lebih daripada sebatas meregulasi, mandat UU 56/2021 diperluas dengan keikutsertaan penyedia jasa terdahulu agar tidak terlibat lebih jauh seperti antara lain investigasi keamanan swasta, perusahaan jasa pelatihan keamanan, perusahaan perangkat keamanan dan penyadapan elektronik, serta perusahaan jasa instalasi peralatan dan tenaga kerja di bidang keamanan. Fokus utama UU 56/2001 adalah penegasan kembali kewenangan PSIRA sebagai lembaga pemerintah dengan kewenangan untuk meregulasi dan mencatat PSMC (Government of South Africa, 2001; Berg & Gabi, 2011). Terakhir, UU 27/2006 dapat diterapkan di Afrika Selatan pada tahun yang bersamaan dengan pendirian STTEPI. Dapat dikatakan terlihat pola keseimbangan hubungan antara perusahaan PSMC dengan pemerintah Afrika Selatan. Di satu sisi pemerintah memiliki kecenderungan dalam melindungi industri militer sebagai salah satu kekuatan ekonomi, dan di sisi lain PSMC tetap dapat melanjutkan bisnis (Bosch, 2011).

Tabel 1. *Klasifikasi peran PSMC*

<b>Dukungan Pertempuran</b>	<b>Logistik, Pengadaan, Pelatihan, Lain-lain</b>	<b>Layanan Keamanan</b>
Operasi dan kepemimpinan pertempuran	Pengadaan bahan perang dan perlengkapan senjata	Perlindungan pribadi & layanan pengawalan VIP
Operasi kontra-pemberontakan	Pengembangan dan pelatihan kekuatan	Pengamanan untuk instalasi dan personel utama
Pengganda paksa	Perencanaan strategis	Layanan pengawasan
Operasi dan pemeliharaan persenjataan canggih	Riset dan analisis ancaman	Pengamanan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan
Intelijen dan analisis militer	Dukungan logistik dan fasilitas pemeliharaan	Saran manajemen krisis (misalnya tentang penculikan)
Dukungan artileri	Penghancuran ranjau	Peretasan komputer
Teknik militer	Pengumpulan pajak	Pengamanan omunikasi
Layanan penerbangan	Pelatihan keamanan staf	Intersepsi sinyal
Saran dan perencanaan militer	Analisis risiko	Audit keamanan

(Sumber: Bures, 2005: 536)



Gambar 1. Anggota EO  
(Sumber: Fitzgibbon, 2020)

## Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa di Afrika Selatan terjadi sebuah relasi kompleks antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan industri PSMC sebagai pelaku bisnis yang bergerak di bidang pertahanan. PSMC menjadi jenis industri yang bermula akibat terjadi perubahan arah politik besar diikuti kelabilan kondisi politik dan keamanan kawasan. Negara mengharuskan pihak-pihak terkait seperti PSMC untuk dapat menerima kondisi yang ada dengan meminimalkan kerugian yang berpotensi dapat timbul selain meraup peluang bagi kepentingan ekonomi negara. Di satu sisi, PSMC diuntungkan dengan negara merekrut jasa secara profesional. Di sisi lain, negara juga menerima timbal balik berupa kondisi keamanan nasional yang lebih terjamin ketimbang tidak menggunakan PSMC.

Memang, aktivitas tentara bayaran bukan merupakan tindakan yang dianggap legal atau etis di tengah-tengah komunitas internasional. Namun, kondisi keamanan domestik dan wilayah sekitar memberikan paksaan pada pihak-pihak terkait dalam rangka memanfaatkan segala sumber daya dan peluang untuk dapat memperbaiki keadaan. Ke depan, studi terkait industri PSMC dapat lebih berkembang lagi dengan kehadiran para peneliti yang multidisiplin, mengingat isu terkait PSMC tidak hanya menyentuh studi dalam sektor keamanan dan politik secara tradisional namun juga merambah pada sektor yang jauh lebih luas seperti aspek ekonomi dan sosial masyarakat negara terutama sekali dalam lingkup bidang ilmu penulis dalam hubungan internasional.

## Daftar Pustaka

- Abrahamsen, R., Williams, M. C. (2012). *Security Beyond the State: Private Security in International Politics*. New York: Cambridge University Press
- Anderton, C. H. (1995). "Chapter 18: Economics of arms trade," dalam *Handbook of Defense Economics*, Elsevier, Volume 1, pp. 523-561.
- Anon. (2012). *The Private Security Industry*. Catholic Parliamentary liaison Office. Briefing paper 313.
- Anon. (n.d). "South African *Apartheid*: The Era of Racial Abuse and Inequality". *Buzzsouthafrica*.
- Axelrod, A., & Dubowe, M. (2014). *Mercenaries: A guide to private armies and private military companies*. Amerika: CQ Press
- Baldwin, D. A. (1979). Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tendencies. *World Politics*, 31(2), 161–194.
- Barlow, E. (2011). *Executive Outcomes: Against All Odds*. Alberton: Galago.
- Berg, J., & Gabi, V. (2011). Regulating Private Security in South Africa Context, challenges and recommendations.
- Boemcken, M. V. (2013). *Between Security Markets and Protection Rackets: Formations of Political Order*. Berlin: Budrich Unipress
- Bosch, M. (2011). South African Private Security Contractors Active in Armed Conflicts: Citizenship, Prosecution and the Right to Work.
- Buress, O. (2013) Private military companies: A second best peacekeeping option? In *Collective Security: Theory, Law, and Practice* (pp. 247-275). New York: Cambridge University Press
- Business & Human Rights Resource Centre. (2009, January 11). *Private security firm Erinys Intl. sued in UK over shooting of civilians in Iraq*. Story.
- Campbell, D. (2002, October 30). Marketing the new "Dogs of War" - ICIJ. Investigation Consortium of Investigative Journalists.
- Cohen, H. J. (2000). *Intervening in Africa : superpower peacemaking in a troubled continent*. New York: St. Martin's Press.

- Dahl, R. A. (1956). *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: The University of Chicago Press
- Dahl, R. A. (2007). The concept of power. *Behavioral Science*, 2(3), 201–215.
- Daniel, J., Roger, S., & Lutchman, J. (2004). *State of the nation 2004–2005*. Pretoria: HSRC Press.
- Fitzgibbon, F. (2020). The World’s First Private Military Contractor: The South African company Executive Outcomes.
- Freeman, C. (2015, 10 Mei). South African mercenaries’ secret war on Boko Haram. *The Telegraph*.
- Government of South Africa. (1998). The Regulation of Foreign Military Assistance Act 15 of 1998.
- Government of South Africa. (2001). The Private Security Industry Regulation Act 56 of 2001.
- Government of South Africa. (2002). The Private Security Industry Levies Act 23 of 2002.
- Government of South Africa. (2006). Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act 27 of 2006.
- Government of South Africa. (2009, August 6). National Conventional Arms Control Committee (NCACC) statement on South African arms sales regulation. Media Statements.
- Government of South Africa. (2021). Regulation of Foreign Military Assistance Act.
- Government of South Africa. (n.d.). National Conventional Arms Control Committee.
- Government of South Africa. (n.d.). Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act, 2006. Government Gazette Vol.509.
- Harding, J. (1997). The Mercenary Business: Executive Outcomes. *Review of African Political Economy* Vol. 24, Issue 71, 87–97.
- Howe, H. M. (1998). Private Security Forces and African Stability: The Case of Executive Outcomes. *The Journal of Modern African Studies* (Vol. 36, Issue 2).
- Ingenhoff, D., & Klein, S. (2018). A Political Leader’s Image in Public Diplomacy and Nation Branding: The Impact of Competence, Charisma, Integrity, and Gender. In *International Journal of Communication* (Vol. 12).
- Isenberg, D. (1997). Soldiers of Fortune Ltd.: A Profile of Today’s Private Sector Corporate Mercenary Firms. *Center for Defense Information*.
- Isenberg, D. (2004). Protecting Iraq’s precarious pipelines. *Asia Times Online*.
- Jha, D. C. (1977). The Power Approach In International Politics. *The Indian Journal of Political Science*, 38(3), 357–374.
- Juma, L., & Tsabora, J. (2014). The South African Defence Review (2012) and Private Military / Security Companies (PMSCs): Heralding a Shift from Prohibition to Regulation? *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 164, 231.
- Kruck, A. (2014). Theorising the use of private military and security companies: a synthetic perspective. *J Int Relat Dev* 17, 112–14.
- Li, X., & Chitty, N. (2009). *Reframing national image: A methodological framework*.
- van Lieshout, J. & Beeres, R. (2022). Chapter 2: Economics of Arms Trade: What Do We Know? dalam R. Beeres et al. (eds.), *NL ARMS Netherlands Annual Review of Military Studies 2021*.
- Maciąg, M. (2019). Engagement of Executive Outcomes in Sierra Leone – utility assessment. *Security and Defence Quarterly*.
- McCain, J. (2017, April 24). African Solutions to African Problems: #Reviewing Composite Warfare. *The Strategy Bridge*.
- Murphy, J. (2015). Eeben Barlow Speaks Out (Pt. 1): PMC and Nigerian Strike Force Devastates Boko Haram.

- Murphy, J. (2015). Eeben Barlow Speaks Out (Pt. 2): Development of a Nigerian Strike Force.
- Murphy, J. (2020, 23 Mei). Eeben Barlow: How We Devastated Boko Haram. SOFREP.
- Mursitama, T. N., & Setyawan, W. (2012). Emerging Role of Multinational Corporations as Private Military Companies: Converging International Relations and International Business Perspectives. *International Journal of Business and Social Science*, 3 (23), 205–212.
- National Assembly. (2004, September 8). South African Private Military Companies in Iraq. News and Events.
- Pech, K. (2014). Executive Outcomes – A Corporate Conquest, in Cilliers, J. & Mason, P. (eds) *Peace, Profit, and Plunder: The Privatisation of Security in War-Torn African Societies*. Institute for Strategic Studies: Pretoria, pp. 83-87.
- Pelton, R. Y. (2006). *Licensed to Kill: Privatizing the War on Terror*. Crown.
- Peoples, C., Williams, Nick V. (2021). *Critical Security Studies: An Introduction (3<sup>rd</sup> Edition)*. New York: Routledge
- Reanette, T. (2020). The Private Security Sector in South Africa: Chapter Three Private and Public Security in South Africa. In Panic City Crime and the Fear Industries in Johannesburg (pp. 17-68). Stanford University Press
- Senekal, B. A. (2012). South Africa's role in the private military industry in the post-Cold War conflict environment with specific reference to the South African connection to Erinys International. *Southern Journal for Contemporary History*, 37(2), 288-313.
- Specialised Tasks, Training, Equipment and Protection International (STTEPI) (n.d). "Mission Statement". STTEPI International.
- Tayo, T. (2021, February 8). Soldiers for rent in the Boko Haram crisis. Institute for Security Studies. <https://issafrica.org/iss-today/soldiers-for-rent-in-the-boko-haram-crisis>
- Tromp, B. (2004, February 4). Hired guns from SA are flooding Iraq. IOL News.
- United Kingdom Parliament. (n.d). "CHAPTER 2—THE PRIVATE MILITARY COMPANIES PERSPECTIVE". United Kingdom Parliament.
- United Nations General Assembly (UNGA). (1997, 16 Oktober). A/52/495. Report by Mr Enrique Bernales Ballesteros, Special Rapporteur on the question of the use of mercenaries, para 71.
- van Munster, R. (2005). *Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and the War on Terror*.
- Wæver, O. (2011). Politics, security, theory. *Security Dialogue*, 42(4–5), 465–480.
- White, C. L. (2012). Brands and national image: An exploration of inverse country-of-origin effect. *Place Branding and Public Diplomacy*, 8(2), 110–118.
- Williams, M. C. (2003). Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics. In *Quarterly* (Vol. 47, Issue 4).
- Wren, C. S. (1989, October 1). South Africa Disbands Special Police in Namibia. *The New York Times*.
- Wrigley, C. (1999, March). The Privatisation of Violence. Campaign Against Arms Trade.
- Zamyatin, D. N. (1998). Political Geographic Images and Geopolitical World Pictures. – *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 80.